

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Jakarta sebagai ibu kota negara dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan, terutama pada periode 2020-2025. Periode tersebut ditandai oleh dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pembatasan aktivitas sosial menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terganggunya rantai pasok, serta melemahnya kinerja pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di sisi lain, pandemi juga meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, efisien, dan transparan.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, kolaborasi strategis dengan kota mitra yang memiliki kapasitas menjadi semakin penting. Salah satu bentuk kemitraan yang relevan adalah kerja sama *Sister City* antara Jakarta dan Tokyo. Kemitraan ini memberikan peluang bagi Jakarta untuk memperoleh *transfer of knowledge, sharing best practices*, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Meskipun hubungan kemitraan antara Jakarta dan Tokyo telah terjalin sejak tahun 1989, periode tahun 2020 menjadi momentum penting melalui pembaruan (*renewal*) kerja sama sekaligus penajakan isu-isu kolaborasi baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan perkotaan kontemporer.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kerja sama *Sister City* antara Jakarta dan Tokyo pada periode 2020-2025 memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan *Smart Governance* di Jakarta. Pertama, dalam aspek *e-government*, kerja sama ini diimplementasikan melalui program *On the Job Training (OJT)* bagi aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Tokyo Metropolitan Government (TMG). Program ini menjadi sarana transfer pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan pemerintahan berbasis digital. Implementasi ini sejalan dengan konsep *Smart Governance* menurut Boyd Cohen (2012), khususnya pada dimensi *ICT and E-Government*, yang

menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.

Kedua, dalam penanggulangan bencana pandemi, kerja sama Jakarta-Tokyo diwujudkan melalui partisipasi Jakarta dalam *Global City Network for Sustainability* (G-NETS). Melalui platform ini, Jakarta memperoleh akses terhadap pertukaran informasi, pengalaman kebijakan, serta praktik terbaik dalam menghadapi krisis global. Implementasi ini mencerminkan karakteristik *Smart Governance* yang menekankan kolaborasi antar aktor, penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat.

Ketiga, dalam penguatan kapasitas ekonomi dan pemberdayaan UMKM, kerja sama *Sister City* diimplementasikan melalui program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur). Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, serta Tokyo Small and Medium Enterprise Support Center. Melalui kegiatan pelatihan, pendampingan usaha, seminar inovasi, dan *Business Matching*, program Jakpreneur berhasil meningkatkan daya saing UMKM Jakarta.

Secara teoritis, temuan penelitian ini sejalan dengan teori *Sister City* yang dikemukakan oleh O'Toole (2001), yang menekankan bahwa kerja sama antarkota merupakan kemitraan jangka panjang yang menciptakan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya. Temuan dalam penelitian ini juga turut mengonfirmasi relevansi konsep *Smart Governance* oleh Boyd Cohen (2012), di mana tata kelola pemerintahan yang cerdas ditandai oleh integrasi teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan yakni perbedaan zona waktu, ketergantungan pada agenda tahunan dari pihak Tokyo Metropolitan Government, serta keterbatasan pembiayaan yang memerlukan prioritas program. Namun, hambatan tersebut tidak mengurangi signifikansi kontribusi kerja sama terhadap penguatan *Smart*

Governance di Jakarta, melainkan menjadi catatan penting untuk peningkatan efektivitas kerja sama di masa mendatang.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi maupun pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini lebih banyak menggunakan data hasil wawancara sebagai sumber utama informasi. Namun, dalam pelaksanaannya tidak seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari informan karena beberapa data bersifat internal dan tidak dapat dipublikasikan. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan dalam memperoleh referensi dan data pendukung yang lebih mendalam terkait penelitian. Selain itu, proses pengurusan wawancara dengan pihak terkait memerlukan proses yang cukup panjang sehingga memengaruhi durasi pelaksanaan penelitian.

Selanjutnya, penelitian ini hanya berfokus pada dimensi *Smart Governance* sebagai salah satu dari enam dimensi dalam konsep *Smart City*, sehingga pembahasan mengenai implementasi *Smart City* belum mencakup keseluruhan aspek secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi *Smart City* secara lebih luas dengan melibatkan dimensi lainnya, seperti *Smart Economy*, *Smart Mobility*, *Smart Environment*, *Smart Living*, maupun *Smart People*.

6.2.2 Saran Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teori *Sister City* dan konsep *Smart Governance* sebagai landasan analisis penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori *Sister City* oleh O'Toole (2001) dan konsep *Smart Governance* oleh Cohen (2012) cukup tepat dalam menjelaskan implementasi kerja sama Jakarta-Tokyo dalam pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis

teknologi. Namun, dalam proses penelitian ditemukan bahwa kedua pendekatan tersebut masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan dinamika implementasi kerja sama secara lebih mendalam dan kontekstual, khususnya pada kondisi kota berkembang seperti Jakarta. Maka dari itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan teori atau konsep tambahan seperti *Smart City* atau *Paradiplomacy* sebagai landasan agar dapat mendapatkan analisis yang lebih kritis.

Selain itu, penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan metode *mixed methods* agar hasil penelitian tidak hanya diperoleh melalui pendekatan kualitatif, tetapi juga diperkuat dengan data kuantitatif yang lebih terukur. Penggunaan metode tersebut dapat membantu peneliti dalam melihat efektivitas implementasi program, tingkat partisipasi masyarakat, maupun dampak kebijakan secara lebih objektif dan mendalam, sehingga menghasilkan analisis yang lebih kontekstual, valid, dan menyeluruh.